

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI *ONLINE* OLEH SUBDIT V *CYBER CRIME* POLDA LAMPUNG

**Oleh
Dela Septiana**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak negatif berupa meningkatnya tindak pidana penipuan online dengan modus investasi. Investasi *online* merupakan kegiatan penempatan dana pada berbagai instrumen keuangan melalui platform digital yang dapat diakses via internet. Penelitian ini mengkaji maraknya penipuan melalui berbagai website dan aplikasi investasi yang menyebabkan kerugian finansial hingga jutaan rupiah serta dampak psikologis pada korban. Maka dari itu penulis akan menganalisis terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Polisi, Dosen Hukum Perdata, dan Dosen Hukum Pidana. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitian secara mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung telah dilakukan secara non-penal (preventif) dan penal (represif). Secara non-penal, Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung aktif melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital, memblokir platform investasi ilegal, dan melakukan kerjasama dan koordinasi multi stakeholder yang terlibat dalam ekosistem investasi *online* dan pencegahan penipuan. Secara penal, Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan pemanfaatan teknologi forensik digital, serta koordinasi dengan OJK dan lembaga

Dela Septiana

terkait dalam proses penuntutan dan eksekusi pidana. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* meliputi regulasi yang mengatur masih terdapat kelemahan dan kurang spesifik, kapasitas aparat dan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung perlu meningkatkan kapasitas dan keahlian penyidik dalam teknologi informasi dan forensik digital agar dapat mengelola bukti elektronik dengan akurat serta menjaga integritasnya untuk proses hukum. Selain itu, penting memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat membantu dalam penanganan kasus *cyber crime*. Edukasi dan sosialisasi preventif kepada masyarakat juga wajib ditingkatkan melalui berbagai media dan kerja sama dengan perguruan tinggi, guna membantu masyarakat mengenali investasi ilegal dan melindungi diri dari penipuan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Investasi Online, Polisi

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE INVESTMENT FRAUD BY SUBDIT V OF THE LAMPUNG REGIONAL POLICE CYBER CRIME OFFICE

**By
Dela Septiana**

The rapid development of information technology has had a negative impact in the form of an increase in online fraud using investment methods. Online investment is the activity of placing funds in various financial instruments through digital platforms accessible via the internet. This study examines the rise of fraud through various investment websites and applications, resulting in financial losses of up to millions of rupiah and psychological impacts on victims. Therefore, the author will analyze how criminal law enforcement against online investment fraud is carried out by the Lampung Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate V and the factors influencing the enforcement of criminal law against online investment fraud the Lampung Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate V.

The author employed a normative juridical and empirical juridical approach in this research. The data collected included primary and secondary data, obtained through fieldwork and literature review. This research also involved interviews with several informants, including police officers, civil law lecturers, and criminal law lecturers. After data collection, analysis was conducted using descriptive-qualitative methods to explain the research findings in depth and comprehensively.

Based on the results of research and discussions, criminal law enforcement against criminal acts of online investment fraud by Subdit V Cyber Crime of the Lampung Regional Police has been carried out in a non-penal (preventive) and penal (repressive) manner. In a non-penal manner, the Lampung Police Sub-Directorate V Cyber Crime actively carries out education and outreach to increase digital literacy, block illegal investment platforms. In penal, the Sub-Directorate V Cyber Crime Polda Lampung carries out inquiries and investigations using digital forensic technology, as well as coordinating with the OJK and related institutions in the criminal prosecution and execution process. Factors that influence the enforcement of criminal law against criminal acts of

Dela Septiana

online investment fraud include regulations that are still weak and lack specificity, the capacity and resources of law enforcement officials, as well as low public awareness and participation.

The author's recommendation in this research is that the Lampung Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate V needs to improve the capacity and expertise of investigators in information technology and digital forensics to accurately manage electronic evidence and maintain its integrity for legal proceedings. Furthermore, it is crucial to strengthen coordination with relevant institutions that can assist in handling cybercrime cases. Preventive education and outreach to the public must also be increased through various media and collaboration with universities to help the public recognize illegal investments and protect themselves from fraud.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Fraud Crimes, Online Investment, Police